

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Akan tetapi, dalam kenyataan masalah kesenjangan sosial secara mendasar belum dapat dipecahkan. Berdasarkan keadaan ini, harus ada jalan keluar untuk memecahkanya. Permasalahannya, bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih ada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan, keterbelakangan, dan membutuhkan pertolongan agar lebih berdaya dan mandiri. Menurut Onny Prijono (1996: 97), memberdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayaikan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala dan sektor kehidupan.

Menurut Mubyarto, orang miskin harus diberdayakan, dibangunkan dari ketidakberdayaan, dan kata kunci bagi mereka adalah keberdayaan, keswadayaan dan kemandirian (Mubyarto, 1994: 82). Kemandirian tersebut bukan hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, akan tetapi dapat tumbuh dan berkembang dengan kemampuan atau kekuatan sendiri. Memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat

masyarakat dalam kondisi yang tidak mampu agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan (Gunawan, 1996: 6).

Upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut.

*“Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi (daya) masyarakat pada berkembang. Pemberdayaan itu sendiri berarti upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi (daya) yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan langkah-langkah atau cara yang positif dan nyata, memberikan input kepada masyarakat, dan membuka akses terhadap sumber daya yang tersedia dengan memberi peluang-peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ketiga, memberdayakan masyarakat berarti pula lemah dan harus dilakukan pencegahan agar tidak bertambah lemah”.* (Gunawan, 1996: 67-68)

Permasalahan penyandang cacat di mana sistem yang ada saat ini terutama berdasarkan pada semangat amal yang tidak mampu melakukan apa-apa terhadap kebutuhan individual. Tak peduli seberapa berkuasanya para pekerja sosial, mereka tetap tidak akan mampu mengenali kebutuhan seluruh penyandang cacat sebagai individu-individu. Belum lagi persoalan bagaimana memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan besar terutama di negara-negara berkembang. Satu-satunya pilihan yang realistik adalah para penyandang cacat sendirilah yang harus bergerak, atas kemauan sendiri dan untuk kepentingan sendiri (Coleridge, 1997: 68).

Berikut merupakan perbedaan sikap antara orang yang mengalami pemberdayaan dengan yang tidak mengalami pemberdayaan.

Tabel 1. Perbedaan sikap antara orang yang mengalami pemberdayaan dengan yang tidak mengalami pemberdayaan.

Mengalami Pemberdayaan	Tidak Mengalami Pemberdayaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuka akan perubahan 2. Tegas 3. Proaktif 4. Mawas diri 5. Mandiri 6. Berperasaan 7. Belajar dari kesalahan 8. Menghadapi segala sesuatu 9. Hidup di masa sekarang 10. Realistik 11. Berpikir relatif 12. Harga diri tinggi, percaya diri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertutup, tak mau berubah 2. Agresif 3. Reaktif 4. Menyalahkan orang lain 5. Tergantung pada orang lain 6. Dikuasai emosi 7. Merasa terpukul kalau salah 8. Cenderung menghindar 9. Hidup di masa lalu atau masa depan 10. Tidak realistik 11. Berpikir mutlak-mutlakan 12. Rendah diri

(Sumber: Coleridge, 1997: 69)

Seseorang yang telah mengalami pemberdayaan akan memiliki perubahan sikap secara sepat dan memiliki sikap yang lebih positif. Akan tetapi hal tersebut perlu adanya kesempatan yang harus diberikan oleh masyarakat kepada penyandang cacat seperti yang disampaikan oleh Peter Coleridge sebagai berikut.

“Karaktersistik seorang yang mengalami pemberdayaan akan terbukti seketika. Pemberdayaan datang dari sikap-sikap positif

seperti yang telah disebutkan di atas. Meski tampak begitu kuat, seorang yang telah mengalami pemberdayaan tidak akan merugikan siapa pun. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk belajar memandang diri sendiri secara positif, dan sikap positif itu akan membuat orang-orang lain ketularan". (Coleridge, 1997: 69)

2. Lembaga Kemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan

Proses pemberdayaan tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik jika hanya dilakukan oleh satu pihak yaitu masyarakat. Perlu diketahui bahwasanya untuk mewujudkan pemberdayaan tersebut dibutuhkan peran suatu lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan dari *social institution* (Soekanto, 2007: 171). Menurut Leopold Von Wiese dan Howard Becker dalam Soekanto, mengartikan lembaga kemasyarakatan dilihat dari sudut pandang fungsinya sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan tersebut dengan kepentingan manusia dan kelompoknya (Soekanto, 1990: 197). Suatu lembaga yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi antara lain; memberikan pedoman bertingkah laku dan bersikap kepada anggotanya dalam menghadapi masalah yang bersangkutan dengan pemenuhan kebutuhan, menjaga keutuhan masyarakat serta sebagai suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang mengawasi

tingkah laku anggotanya dalam masyarakat (Soekanto, 1990: 192-193).

Pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari keberadaan peranan Organisasi Non-Pemerintah atau NGO (*Non Govermental Organizations*) yang tersebar baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Menurut UNDP, NGO meliputi organisasi atau kelompok yang kegiatannya antara lain di bidang pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan mutu dan taraf hidup rakyat, advokasi dan pemberdayaan masyarakat (Onny, 1996: 97).

Salah satu bentuk dari lembaga kemasyarakatan adalah yayasan. Yayasan telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat sejak dahulu. Lembaga yang didirikan untuk tujuan non profit ini menjadi hal yang penting dalam rangka berkontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara umum, lembaga apapun yang dibentuk atas keswadayaan masyarakat disebut sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) atau dengan istilah *Non Government Organization* (NGO). Selanjutnya, lembaga-lembaga, badan-badan atau organisasi ini menspesifikasi diri atau dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan tujuan pembentukan ke dalam bentuk-bentuk badan yang di Indonesia dikenal dengan istilah Yayasan

dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM (Lembaga Bakti Indonesia, 2011).

Yayasan merupakan salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan yang pada dasarnya hampir sama dengan LSM dalam beberapa hal. Sebagai contoh, berdasarkan tujuannya, sama-sama menjadi organisasi non profit atau tidak mencari laba dalam setiap kegiatannya, serta bergerak di bidang sosial kemasyarakatan bukan kegiatan bisnis atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Meskipun di bawah Yayasan atau LSM dapat mendirikan usaha-usaha untuk membantu pemasukan lembaga atau memperoleh dana demi menjalankan misinya. Berdasarkan keanggotaan, yayasan dan LSM merupakan lembaga atau badan yang tidak mempunyai anggota. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dalam tubuh yayasan hanya terdapat badan pendiri dan badan pengurus, serta dapat diangkat beberapa orang untuk masuk dalam badan pengawas, pembina, penasehat, dan pelindung.

Beberapa perbedaan antara Yayasan dan LSM dapat dirinci sebagai berikut yakni jika dilihat dari kegiatan khususnya, yayasan lebih mengarah pada gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan saja, contoh terdapat yayasan panti asuhan, yayasan sosial amal zakat, yayasan keagamaan, pesantren, juga terdapat yayasan pendidikan.

Intinya, segala kemampuannya dikerahkan untuk kegiatan yang bersifat untuk kepentingan orang banyak. Sementara LSM mempunyai kegiatan yang lebih mengarah pada keprofesionalitasan atau dapat dikatakan lebih militan dalam setiap gerakannya dibanding dengan yayasan.

b. Peran Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Onny (1996: 103-104), peran lembaga kemasyarakatan dalam proses memberdayakan rakyat di Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut.

- 1) Pendekatan kemanusiaan, walaupun tidak memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sasarannya, tetapi dapat memberdayakan NGO itu sendiri. Tujuan pendekatan ini adalah membantu secara spontan dan sukarela kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan karena terkena musibah, atau kurang beruntung. Pendekatan ini terutama dilakukan oleh lembaga penyandang dana (*grantmarking* atau *fundaring institute*) seperti Yayasan Dana Gotong Royong.
- 2) Pendekatan pengembangan masyarakat, bertujuan mengembangkan, memandirikan, dan menswadayaikan masyarakat seperti dilakukan oleh Dian Desa dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) yang merintis Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu), yang kemudian menjadi salah satu program pemerintah. Yayasan Sosial Tani Membangun (YSTM), merintis Usaha Bersama, kemudian mendirikan Yayasan Bina Swadaya yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga NGO dan pemerintah yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat.

- 3) Pendekatan pemberdayaan rakyat, bertujuan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Caranya adalah dengan melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah seperti dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Solidaritas Perempuan, dan Indonesia NGO Forum on Indonesia (INFID).

Menurut Agnes (2003: 53-54), dalam memberdayakan masyarakat terdapat 4 peran utama pemberdayaan, yaitu peran fasilitatif, peran kependidikan, peran perwakilan, dan peran teknis. Adapun penjelasan dari peran tersebut yakni.

- 1) Peran fasilitatif

Peran fasilitatif yang dimaksud disini adalah mendorong dan mendukung proses pembangunan masyarakat. Fasilitas tersebut dapat berupa pemberian keterampilan, memfasilitasi kelompok, memberikan dukungan, dan pengorganisasian.

2) Peran kependidikan

Peran kependidikan dapat diartikan sebagai peran aktif dalam melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan dengan memberikan input yang positif dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Pemberian pendidikan ini dapat berupa kegiatan memberikan informasi dan pelatihan.

3) Peran perwakilan

Peran perwakilan dapat diartikan berupa upaya mewakili masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan perwakilan ini dapat dilakukan dengan menggalang sumber daya dari luar, jaringan kerja, pengetahuan dan pengalaman melalui studi banding.

4) Peran teknis

Peran teknis diartikan sebagai upaya memberikan bantuan teknis dalam proses pembangunan masyarakat pedesaan memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan.

3. Penyandang Cacat

a. Pengertian Penyandang Cacat

Menurut Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 pasal 1 tentang penyandang cacat, pengertian penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental,

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.

Istilah penyandang cacat juga memiliki banyak arti. Kecenderungan dalam berbahasa umumnya adalah perubahan pergantian kosa kata yang didasari niat menghaluskan kata-kata tertentu.

“Kata cacat itu sendiri, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (1990: 143) diartikan sebagai ‘1. Kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak); 2. Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaanya menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3. Cela, aib; 4. Tidak (kurang) sempurna’, sedangkan kecacatan artinya ‘perihal cacat; keburukan; kekurangan (p. 147). Menyandang cacat dimaknai sebagai ‘menderita cacat’ (p779)’. (Coleridge, 1997: 135)

Penyandang cacat fisik sering disebut juga dengan istilah tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata “tuna” yang berarti rugi, kurang dan “daksa” yang berarti tubuh (Assjari, 1995: 33). Sedangkan dalam bahas Inggris disebut dengan *Difable*. Tunadaksa ditujukan kepada mereka-mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, misalnya buntung atau cacat. Demikian pula untuk istilah tunatubuh. Sedangkan istilah cacat fisik dan cacat tubuh dimaksudkan untuk menyebut mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuhnya bukan cacat pada inderanya (Assjari, 1995: 33).

Memperhatikan jenis, berat ringan dan beragamnya kelainan pada penyandang cacat menyebabkan sulitnya merumuskan definisi yang tepat tentang penyandang cacat yang dapat merangkum semua jenis kelainan yang ada. Meskipun demikian, pengertian tentang penyandang cacat dapat didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang bersifat primer atau sekunder yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi.

b. Klasifikasi Penyandang Cacat

Menurut Musjafak (1997: 35), klasifikasi penyandang cacat ditinjau dari faktor-faktor yang menyebabkan kelainan sebagai berikut.

1) Cacat Bawaan (*congenital Abnorlamities*).

Cacat bawaan ini terjadi pada saat anak dalam kandungan (pra-natal) atau kecacatan terjadi pada saat anak dilahirkan.

2) Infeksi pada Anggota Gerak atau Bagian Tubuh Lainnya.

Kelainan ini bersifat sekunder karena merupakan akibat dari adanya infeksi misalnya *Poliomyelitis* dan *Osteomyelitis*.

3) Gangguan Metabolisme.

Gangguan metabolisme dapat terjadi pada bayi dan anak-anak disebabkan faktor gizi (nutrisi), sehingga

memperngaruhi perkembangan tubuh dan mengakibatkan kelainan pada sistem ortopedis dan fungsi intelektual.

4) Kecelakaan.

Kecelakaan atau istilah lainnya disebut dengan trauma dapat mengakibatkan kelainan ortopedis berupa kelaianan koordinasi, mobilisasi atau kelaian yang lain tergantung akibat dari kecelakaan tersebut.

5) Penyakit yang Progresif.

Kecacatan ini dapat terjadi karena penyakit yang progresif yang diperoleh melalui genetik (keturunan) atau karena penyakit. Misalnya DMP (*Dystrophia Muscularum Progressiva*).

6) Penyandang Cacat yang Tidak Diketahui Penyebabnya.

Kelainan jenis terakhir ini sulit untuk dideteksi faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka menjadi tunadaksa, karena sangat sulitnya mendeteksi faktor penyebab kelainannya maka mereka dikelompokan kedalam jenis yang tidak diketahui sebab-sebabnya (*Miscellaneos Causes*).

C. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Dewinta Prasasti mahasiswa jurusan pendidikan sosialogi UNY 2005 berjudul "Peran Lembaga Lokal Sari Pratiwi Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui

Pertanian Organik di Dusun Granting Desa Sapan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Lokal Sari Pratiwi tersebut dalam memberdayakan masyarakat Desa Manisrenggo melalui pertanian organik.

Adapun persamaan yang dimiliki dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi dewanti yakni dimana tujuan penelitiannya adalah mengetahui bagaimana peran sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat. Selain itu pula penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian yang dilakukan oleh Santi Dewanti berjumlah dua yakni petani organik dan non organik. Objek peneliti hanya satu objek yakni karyawan Mandiri Craft. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada model pemberdayaan yang dilakukan lembaga. Pada penelitian Santi Dewanti, LSM tersebut melakukan pemberdayaan melalui pertanian organik, sedangkan Lembaga yang dikaji peneliti menggunakan pemberian pelatihan keterampilan dan lapangan kerja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi UNY 2006 yang berjudul "Peran Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (SP-3) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Melalui Wirausaha Peternakan Burung Puyuh". Adapun tujuan dari

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan dalam memberdayakan masyarakat melalui wirausaha peternakan burung puyuh.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama meneliti bagaimana peranan sebuah lembaga dalam memberdayakan masyarakat. Selain itu persamaan juga terletak dalam program pemberdayaan dimana salah satu program pemberdayaan melalui wirausaha. Penelitian tersebut juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada pekerjaan yang dilakukan oleh para objek pemberdayaan. Pemberdayaan yang ada pada penelitian Abdul Aziz dilakukan kepada para peternak. Adapun pemberdayaan yang ada pada peneliti adalah kepada para karyawan yang merupakan penyandang cacat

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan karena melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan bahwa Mandiri Craft adalah suatu bentuk usaha dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri yang

mengupayakan agar para penyandang cacat usia produktif mendapat lapangan pekerjaan dan hidup layak di tengah masyarakat.

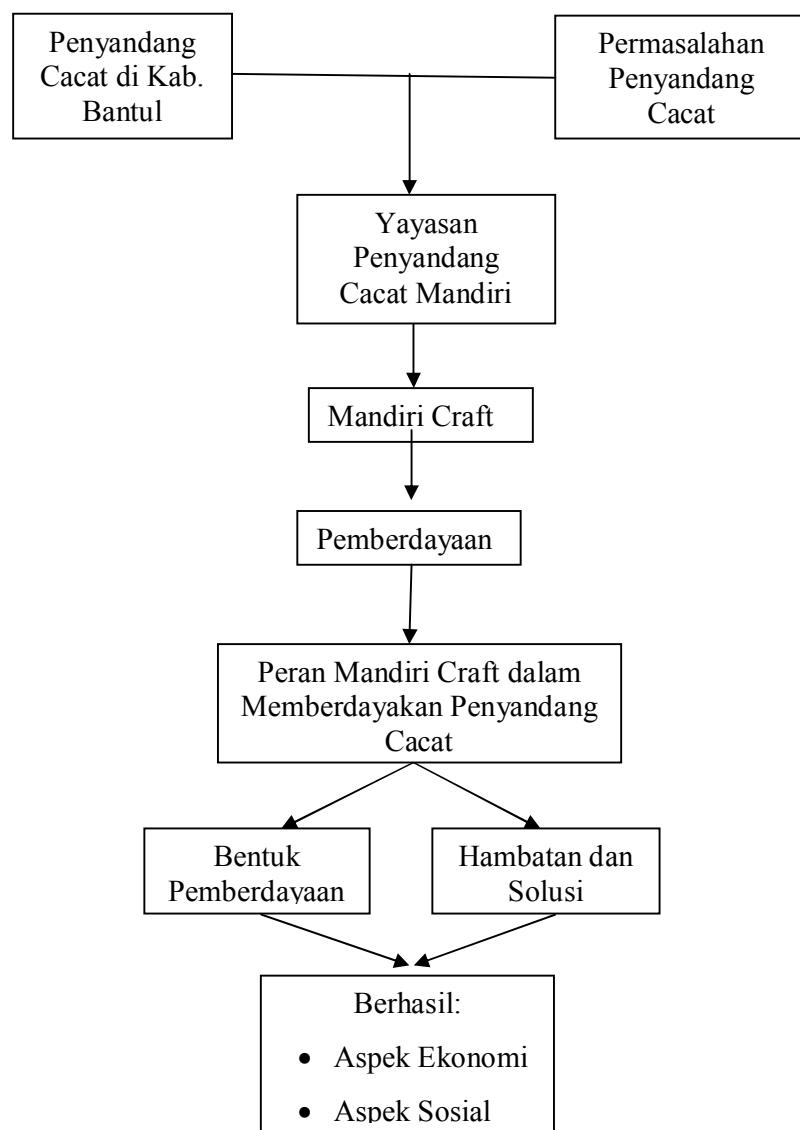
Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Permasalahan yang dialami oleh penyandang cacat yakni dimana mereka masih sangat terdiskriminasikan. Penyandang cacat terbelenggu oleh adanya keterbatasan dalam mengembangkan potensi dirinya, kesempatan untuk belajar sangat terbatas atau tidak ada sama sekali, tidak mampu untuk hidup mandiri secara ekonomi serta ketergantungan hidup pada orang lain secara sosial dan ekonomi. Gempa bumi yang terjadi di Bantul mengakibatkan jumlah penyandang cacat di Bantul bertambah. Banyak yang mengalami kecacatan sehingga menyebabkan kehilangan pekerjaan mereka.

Melihat permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu usaha untuk memberdayakan penyandang cacat. Tentu saja usaha tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyandang cacat sendiri, tetapi diperlukan campur tangan pihak lain seperti Yayasan Penyandang Cacat Mandiri. Guna melakukan pemberdayaan terhadap para penyandang cacat, yayasan tersebut membentuk sebuah usaha bernama Mandiri Craft sebagai wadah dalam pelaksanaan pembedayaan tersebut. maka disinilah peran Mandiri Craft dalam memberdayakan penyandang cacat khususnya di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hampir semua pengurus dan karyawan Mandiri Craft

merupakan penyandang cacat yang telah diberdayakan. Usaha pemberdayaan penyandang cacat tentunya memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui solusi yang diterapkan oleh Mandiri Craft.

Peran Mandiri Craft dalam memberdayakan penyandang cacat di Kabupaten Bantul ternyata berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari dua aspek. Aspek tersebut yakni aspek ekonomi dan aspek sosial.

Berikut merupakan bagan kerangka pikir.



Bagan 1. Kerangka pikir